

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia memberikan pemerintah daerah wewenang yang besar untuk mengatur dan mengawasi urusan wilayah pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip desentralisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kinerja dan efisiensi pemerintahan, serta memastikan pembangunan yang lebih merata sejalan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi wilayah. Otonomi daerah pada hakikatnya berfungsi sebagai alat penyelenggaraan pembangunan negara agar tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efisien (Tahar & Kuncahyo, 2020). Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang didukung oleh prinsip desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah lebih bebas dalam mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 32/2004 yang mengatur tentang alokasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun kewenangan telah diberikan, masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah dan penyerapan sumber daya anggaran. Salah satu tantangan yang cukup signifikan adalah rendahnya serapan anggaran. Rendahnya serapan anggaran dapat mengakibatkan tujuan pembangunan daerah menjadi lebih lambat dan memungkinkan minimnya dampak positif bagi masyarakat. Pengelolaan

anggaran daerah merupakan aspek penting dalam mencapai efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Pada tahun 2019-2021, penyerapan anggaran Pemerintah Kota Malang mengalami fluktuasi yang dimana salah satu faktor mempengaruhi hal tersebut adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan artikel Radar Malang (2022), pada tahun 2019 realisasi belanja daerah mencapai total 76%, namun pada tahun 2020 angka penyerapan turun menjadi 74%. Selain itu, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Kota Malang mencapai Rp 500 miliar, menunjukkan adanya anggaran tidak terserap secara optimal. Kondisi ini terjadi karena banyak program pembangunan yang harus ditunda atau dialihkan untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial. Pada tahun 2021, penyerapan anggaran meningkat menjadi 84,5%, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fluktuasi penyerapan anggaran ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota malang dalam anggarannya selama pandemi.

Selain tantangan penyerapan anggaran di masa pandemi, Pemerintah Kota Malang kini berusaha untuk meningkatkan efisiensi anggaran supaya dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Kebijakan efisiensi anggaran tersebut merupakan tantangan baru terutama pada sektor-sektor yang memerlukan alokasi anggaran besar, seperti pariwisata dan infrastruktur (malangkota.go.id).

Kinerja merupakan representasi dari tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu kegiatan, program, atau kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi yang diuraikan dalam perencanaannya

(Mahsun 2014). Kinerja pemerintah yang efektif ditandai dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan akan kinerja yang unggul diterapkan pada banyak pemerintah, berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kinerja menurut definisi dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengacu pada jumlah dan kualitas hasil yang dapat diukur yang diperoleh melalui penggunaan anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun dengan cara sistematis untuk memperkirakan estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Anggaran di Indonesia disusun setiap tahunnya dan memiliki peran yang penting untuk negara karena berfungsi sebagai alat utama untuk kesejahteraan masyarakat dan penilaian kinerja. Anggaran pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin kinerja pemerintah dan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009). Anggaran berfungsi sebagai indikator untuk menilai kinerja dan hasil dalam setiap periode.

Evaluasi kinerja pemerintah sangat penting untuk meningkatkan standar layanan publik dan memberikan wawasan mengenai pencapaian sebelumnya, yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi pemerintah ke depannya. Kinerja pemerintahan mencerminkan seberapa berhasil suatu pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan komitmen organisasi.

Kinerja pemerintah dapat dinilai melalui partisipasi selama proses penganggaran. Diharapkan adanya partisipasi selama proses menyusun anggaran mampu meningkatkan kinerja pegawai di pemerintahan daerah, karena anggaran berperan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian untuk menilai efektivitas. Partisipasi anggaran merujuk pada seberapa besar individu terlibat dan mempengaruhi dalam menyusun dan menetapkan anggaran pada bagian ataupun unitnya selama tahun buku. Penyusunan anggaran di tingkat pemerintah daerah merupakan proses yang rumit dan banyak unit kerja pemerintahan yang terlibat. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut terwujud yaitu melalui partisipasi dalam proses penganggaran (Zeyn & Nuraeni, 2023). Anggaran akan lebih efisien apabila disusun dengan melibatkan eksekutif sebagai pelaksana serta legislatif sebagai pihak pengawas.

Dalam proses penyusunan anggaran, diperlukan persiapan terkait tujuan anggaran yang harus dirumuskan dengan jelas supaya tidak membingungkan pelaksana anggaran dan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Realisasi anggaran diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut, yang akan mempengaruhi penilaian kinerja. Keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran sangatlah penting agar proses penyusunan anggaran berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini harus mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen lainnya sebagai acuan dalam penganggaran berdasarkan tujuan strategi yang ingin dicapai.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah kejelasan sasaran anggaran. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan perangkat daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pencapaian dan ketidakberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan (precilia & Mimba, 2020). Anggaran yang didefinisikan dengan jelas, maka akan mempermudah instansi menyusun rencana untuk mencapai tujuan (Mulya & Fauzihardani, 2022). Ketika target anggaran diartikulasikan dengan baik dan jelas, pemerintah dapat menetapkan prioritas dan merumuskan rencana, program, dan kebijakan selaras dengan keterbatasan anggaran dan situasi ekonomi yang ada (Lorenzo dkk., 2021).

Kinerja suatu pemerintahan sangat terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas pada tingkat pemerintah daerah mengacu pada keseluruhan tahapan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah daerah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku melalui akuntabilitas yang berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Wiguna et al., 2015). Dalam menjalankan program atau kegiatan yang selaras dengan misi dan visi organisasi, setiap aparatur pemerintah perlu memiliki komitmen terhadap organisasi (Jatmiko et al., 2020). Komitmen organisasi memiliki hubungan yang erat dengan seberapa besar keterlibatan individu dengan organisasi tempat dimana mereka bekerja (Tampubolon & Basid, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,

akuntabilitas, komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murtin & Rahmawati (2023), penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja pemerintah daerah dan dengan lokasi penelitian yang berbeda. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola anggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk memberikan bukti bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk memberikan bukti bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk memberikan bukti bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap

kinerja pemerintah daerah.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan melihat hasil dari penelitian ini, adanya pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, sehingga dapat mempermudah bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi dimasa yang akan datang.

